

ABSTRAK

PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JAWI, TALANG PADANG DAN GUNUNG MEGANG

Oleh:

Melsi Febrianti¹

Nensi Yuniarti. Zs²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa Jawi, Desa Talang Padang, dan Desa Gunung Megang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Inspektur Pembantu (IRBAN), Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), kepala desa, dan kaur keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur berperan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui pemeriksaan, audit, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pendampingan. Peran tersebut mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengelolaan aset desa, serta upaya peningkatan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan aparatur desa terhadap ketentuan yang berlaku, perbaikan administrasi dan laporan pertanggungjawaban, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, perubahan regulasi yang dinamis, serta perlunya peningkatan intensitas pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa Jawi, Desa Talang Padang, dan Desa Gunung Megang telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas aparatur desa serta penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: *Inspektorat Daerah, pengawasan, pengelolaan keuangan desa.*

ABSTRACT

THE ROLE OF THE REGIONAL INSPECTORATE OF KAUR REGENCY IN SUPERVISING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN JAWI, TALANG PADANG, AND GUNUNG MEGANG VILLAGES

By:

Melsi Febrianti¹
Nensi Yuniarti. Zs²

This study aims to analyze the role of the Regional Inspectorate of Kaur Regency in supervising village financial management in Jawi Village, Talang Padang Village, and Gunung Megang Village. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. The research informants consisted of Assistant Inspector (IRBAN), Auditors, Regional Government Affairs Supervision Officers (PPUPD), village heads, and village financial affairs officers. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the Regional Inspectorate of Kaur Regency plays a role in supervising village financial management through inspection, auditing, monitoring, evaluation, guidance, and assistance. These roles include supervision of implementation, administration, accountability, village asset management, and efforts to strengthen supervision. The supervision conducted contributes to improving village officials' compliance with applicable regulations, improving administrative procedures and accountability reports, and enhancing transparency and accountability in village financial management. However, the implementation of supervision still faces several obstacles, including limited human resource capacity among village officials, dynamic regulatory changes, and the need to increase the intensity of continuous guidance and monitoring.

Based on the research findings, it can be concluded that the role of the Regional Inspectorate of Kaur Regency in supervising the financial management of Jawi Village, Talang Padang Village, and Gunung Megang Village has been carried out well and has made a positive contribution to improving transparent and accountable village financial governance. Improving the capacity of village officials and strengthening the functions of guidance and supervision on an ongoing basis are necessary to optimize village financial management.

Keywords: Regional Inspectorate, Supervision, Village Financial Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk mengelola keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Desa.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, besarnya alokasi dana desa juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif (I. Polidu et al., 2020). Dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2008).

Dalam pengelolaan keuangan desa, penerapan SPIP diwujudkan melalui pengendalian terhadap kelengkapan dokumen, akurasi pencatatan transaksi, validasi data, rekonsiliasi laporan keuangan, serta pengamanan aset desa. Dengan demikian, setiap transaksi keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif sehingga mampu menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu faktor utama dalam menjamin tercapainya tujuan tersebut.

Pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pembinaan agar pemerintah desa mampu melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan daerah, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Kaur, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pembinaan lainnya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Kaur, 2023). Meskipun telah terdapat regulasi

yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan. Pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih menghadapi kendala, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, ketidaksesuaian administrasi, kesalahan pencatatan transaksi, kurang lengkapnya dokumen pendukung, serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa yang terus mengalami perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan administrasi maupun keuangan apabila tidak segera dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih menjadi tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh R. Fadzillah dan Arifa (2022) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi serta standar akuntansi pemerintahan desa masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, penelitian Kapantow et al. (2024) menyimpulkan bahwa pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan konsistensi laporan keuangan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga oleh efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Bengkulu yang setiap tahunnya menerima alokasi Dana Desa dalam jumlah yang cukup besar. Kabupaten Kaur memiliki 192 desa yang tersebar di lima belas kecamatan dengan karakteristik geografis yang beragam sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Banyaknya desa yang menjadi objek pengawasan menyebabkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur harus membagi wilayah pengawasan ke dalam empat wilayah kerja Inspektur Pembantu (IRBAN), yaitu IRBAN I, II, III dan Irban Khusus (IRBANSUS). Pembagian wilayah tersebut bertujuan agar pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan karakteristik desa yang menjadi wilayah binaannya. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan jumlah auditor yang berjumlah 22 orang dan Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) 9 orang, luasnya wilayah pengawasan pada 192 desa yang tersebar dalam 15 kecamatan, serta perbedaan kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Di samping itu, masih ditemukan berbagai permasalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti ketidaksesuaian dokumen perencanaan dengan realisasi anggaran, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, kesalahan penginputan data pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya membutuhkan kegiatan audit, tetapi juga pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan agar pemerintah desa mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya membahas efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih sangat terbatas. Padahal setiap wilayah pengawasan memiliki karakteristik, kondisi geografis, serta permasalahan yang berbeda sehingga strategi pengawasan yang diterapkan juga dapat berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena memfokuskan kajian pada pelaksanaan peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Jawi, Talang Padang dan Gunung Megang. Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peran Inspektorat Daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Penelitian dilakukan di Desa Jawi, Desa Talang Padang, dan Desa Gunung Megang karena ketiga desa tersebut berada dalam wilayah pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dan menjadi objek pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pemilihan lokasi menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa ketiga desa memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai peran Inspektorat. Selain itu, ketiga desa dipilih karena memiliki perangkat desa yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes sehingga mampu memberikan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Ketiga desa ini sudah ditetapkan

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, berdasarkan hasil penelaahan LHP tahun sebelumnya dan sudah dilakukan rapat dan diputuskan oleh seluruh IRBAN, auditor dan PPUPD.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa sehingga tercipta pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Jawi, Talang Padang dan Gunung Megang."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah utama yaitu bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa Jawi, Talang Padang dan Gunung Megang?.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan yang perlu diperhatikan untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis. Penelitian ini difokuskan pada analisis peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengawasan yang dimaksud meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Inspektorat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap keuangan desa, seperti Inspektur Pembantu, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD). Kepala desa dan perangkat desa juga menjadi informan untuk memperoleh perspektif mengenai pelaksanaan dan dampak pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah ditetapkan, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Desa Jawi, Talang Padang dan Gunung Megang melalui kegiatan audit, monitoring, evaluasi, pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan?.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui secara mendalam peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kaur.

1.5.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian ini adalah mengidentifikasi peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa Jawi, Talang Padang dan Gunung Megang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Untuk Pemerintah Desa

Memberikan wawasan tentang pentingnya kolaborasi dengan Inspektorat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk Pemerintah Daerah

Memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam rangka memperbaiki efektivitas fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dan dasar penelitian lanjutan dalam kajian pengawasan keuangan desa.

4. Manfaat bagi Akademisi dan Mahasiswa

Sebagai sumber referensi atau materi pembelajaran dalam mata kuliah terkait audit internal, pemerintahan desa, atau akuntabilitas publik.